

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Republik Demokratik Laos, di jantung Sub-Wilayah Mekong Raya (GMS), dikelilingi oleh Kamboja, Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Republik Rakyat Tiongkok. Dibandingkan dengan tetangganya, Laos lebih kecil ukurannya, dengan populasi yang lebih rendah, dan kaya akan sumber daya alam. Kombinasi lokasi geografis yang menguntungkan dan sumber daya alam yang melimpah ini berarti bahwa Laos memiliki potensi besar untuk pembangunan sosial ekonomi yang cepat, meskipun harus memastikan perlindungan lingkungan dan ekosistem yang produktif dalam jangka panjang (eyeonasia 2019).

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan jaringan jalan dan transportasi di dalam negeri telah memunculkan koridor ekonomi utara-selatan dan barat timur yang cukup pesat dalam hubungan internasional. Selain itu, Sungai Mekong dan anak-anak sungainya di Laos menyediakan sumber daya

air dan ekosistem yang kaya, dengan potensi yang sangat baik untuk pembangkit listrik, pengembangan irigasi, dan konservasi ekosistem. Potensi tenaga air diperkirakan mencapai 18.000 MW; namun hingga saat ini baru 25 persen dari potensi tersebut yang telah dimanfaatkan (Geheb 2015, 128). Lebih dari 35 tahun setelah Perang Indochina, perkembangan Laos tetap rendah, dan mengklasifikasikannya sebagai *Least Developed Country* (LDC). Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2010 mencapai sekitar US\$1.100 per kapita untuk populasi sekitar 6 juta. Pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 6 hingga 7 persen per tahun. Sumber pendapatan utama termasuk pertanian dan kehutanan, jasa seperti pariwisata, dan industri termasuk pertambangan dan tenaga air. Meskipun Laos memiliki ambisi yang kuat untuk pembangunan nasional pada tahun 2020 dan telah mengalami kemajuan yang relatif, negara ini terus menghadapi sejumlah tantangan utama. Tantangan tersebut termasuk kebutuhan untuk percepatan pengentasan kemiskinan; menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; konservasi sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan ekosistem; dan pembangunan sosial, termasuk pengembangan sumber daya manusia dan penanganan isu *unexploded ordnance* (UXO) (Asian Development Bank 2010).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPBs), juga dikenal sebagai Tujuan Global, diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015

sebagai seruan universal untuk bertindak untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet ini, dan memastikan bahwa pada tahun 2030 semua orang menikmati perdamaian dan kemakmuran. 17 TPB terintegrasi, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui bahwa tindakan di satu bidang akan memengaruhi hasil di bidang lain, dan bahwa pembangunan harus menyeimbangkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Negara-negara telah berkomitmen untuk memprioritaskan kemajuan bagi mereka yang tertinggal. TPBs dirancang untuk mengakhiri kemiskinan, kelaparan, AIDS, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. Kreativitas, pengetahuan, teknologi, dan sumber daya keuangan dari seluruh masyarakat diperlukan untuk mencapai TPBs di setiap konteks. (UNDP 2017, 1)

PBB dan mitranya di Laos sedang bekerja untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: 18 Tujuan yang saling terkait dan ambisius yang membahas prioritas dan tantangan pembangunan utama yang dihadapi oleh orang-orang di Laos dan di seluruh dunia, termasuk TPB18 yang diadopsi secara nasional di Laos pada 'Hidup Aman dari UXO'. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPBs) adalah seruan global untuk bertindak dalam mengakhiri kemiskinan, melindungi lingkungan dan iklim bumi, dan memastikan bahwa orang di mana pun dapat menikmati perdamaian dan kemakmuran. Selain 17 tujuan global, pada tahun 2016 Pemerintah Laos secara resmi meluncurkan

TPB18 nasional, ‘*Lives Safe from UXO*’ (*Unexploded Ordnance*), di hadapan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon. Karena UXO tetap menjadi masalah yang memengaruhi pembangunan nasional dalam berbagai dimensi, maka Laos melalui TPB18 berkontribusi pada hasil nasional di bawah semua TPB lainnya. (opendevelopmentmekong 2019)

Pembangunan berkelanjutan dalam konteks Laos didasarkan pada definisi dan prinsip global, yang diadaptasi untuk mencerminkan keadaan dan kapasitas nasional dalam NSDS 2008. Istilah “pembangunan berkelanjutan” diperkenalkan pada tahun 1987 oleh Komisi Brundtland, sebuah organisasi global tingkat tinggi yang dimaksudkan untuk menggalang negara-negara untuk bekerja dalam mengejar tujuan ini bersama-sama. Artinya “pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri”. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan didasarkan pada 27 prinsip Deklarasi Rio 1992 (UNGeneralAssembly 1992). Berdasarkan konteks global ini, di Laos, visi Pemerintah untuk pembangunan berkelanjutan diumumkan dalam *National Strategies for Development Statistic* (NSDS) 2008, yaitu, “Mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan dari semua orang di Laos melalui pengejaran ekonomi yang sejahtera secara simultan dan terpadu, masyarakat yang adil dan lingkungan yang sehat.” Melengkapi tujuan nasional kelulusan

dari status LDC pada tahun 2020, NSDS berfokus pada empat bidang keberlanjutan: 1) pembangunan ekonomi berkelanjutan; 2) kesejahteraan dan pembangunan sosial yang berkelanjutan; 3) pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkelanjutan; dan 4) tata pemerintahan yang baik (MPI dan WREA. 2008).

Perencanaan terpadu dianggap sebagai pendekatan yang dapat mengarah pada pembangunan berkelanjutan. Laos telah menggunakan perencanaan dan pendekatan partisipatif untuk mengarusutamakan aspek pembangunan berkelanjutan ke dalam semua proses dan strategi pembangunan. Sebagai contoh, pendekatan-pendekatan ini telah mendukung tidak hanya Arah Pembangunan Negara dan Strategi Jangka Panjang Pembangunan Sosial Ekonomi hingga Tahun 2020, tetapi juga Rencana Pembangunan Sosial Ekonomi Nasional lima tahun berturut-turut (*National Socio-Economic Development Plan* (NSEDP) 2001-2005, 2006-2010 dan 2011- 2015) dan Strategi Sektoral. (Government of the Lao People's Democratic Republic 2018, Secara keseluruhan Arah Pembangunan Negara, Strategi Jangka Panjang Pembangunan Sosial Ekonomi dan Rencana Pembangunan Sosial Ekonomi Nasional lima tahun adalah kebijakan dan rencana menyeluruh yang menggabungkan aspek-aspek berkelanjutan dan menetapkan tujuan di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Berdasarkan kebijakan dan rencana

menyeluruh; strategi di bidang ekonomi seperti strategi transportasi berkelanjutan, energi terbarukan, pariwisata, perdagangan, dan pertambangan dirumuskan untuk memandu keberlanjutan pembangunan ekonomi. Sedangkan untuk bidang sosial, misalnya strategi pendidikan, kesehatan masyarakat dan gender dirumuskan untuk menjamin keberlanjutan sosial; dan kelestarian lingkungan termasuk dalam lingkungan, kehutanan, keanekaragaman hayati, perubahan iklim, strategi manajemen risiko bencana. Selain itu, strategi penting lainnya seperti *National Strategy for Growth and Poverty Eradication* (NSGPE) dan *Strategic Framework for the National Sustainable Development Strategy* (SFNSDS) yang memasukkan pendekatan pembangunan berkelanjutan dan juga dilaksanakan secara berdampingan dengan strategi sektoral dan menyeluruh tersebut. Implementasi Konvensi-konvensi internasional terkait lingkungan, khususnya MEA, juga termasuk dalam strategi-strategi tersebut.

Komite Pengarah Nasional untuk implementasi TPBs telah dibentuk dengan Keputusan Presiden pada tahun 2017 yang diketuai oleh Perdana Menteri, dengan anggota Komite dari semua kementerian dan lembaga terkait. Sekretariat TPBs Nasional (Sekretariat) dan *focal point* TPBs di kementerian terkait juga telah ditunjuk untuk memimpin dan mengambil alih setiap TPB dan untuk memastikan koordinasi dan kolaborasi di dalam Pemerintah sambil

bekerja dengan badan-badan PBB dan Mitra Pembangunan untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan. Pemerintah Laos berkomitmen kuat pada Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan implementasi serta pencapaian TPBs. Laos adalah salah satu negara paling awal yang melokalisasi TPBs dan mengintegrasikannya ke dalam kerangka perencanaan nasionalnya. Hampir 60 persen indikator NSEDP Kedelapan terkait dengan indikator TPB. Indikator TPB lainnya akan diintegrasikan ke dalam NSEDP Kesembilan dan Kesepuluh. Pada bulan September 2016, Laos telah mengadopsi TPB 18 sebagai tambahan yang disebut “Hidup Aman dari *Unexploded Ordnance* (UXO)”. Bom yang dijatuhkan selama Perang Indocina (1964-1973) menjadikan Laos sebagai negara dengan peringkat satu dalam hal bom yang dijatuhkan per kapita. Mengingat dampak pencemaran UXO, TPB 18 adalah salah satu tujuan prioritas utama Laos.

Pada November 2015, Laos dan 32 mitra pembangunannya mengadopsi Deklarasi Vientiane tentang Kemitraan untuk Kerja sama Pembangunan yang Efektif (Pemerintah Laos, 2015). Penerapan Deklarasi ini menempatkan tanggung jawab bersama pada pemerintah dan mitranya untuk transisi dari agenda efektivitas bantuan sebelumnya ke agenda baru untuk MSP yang transformatif, inklusif, dan akuntabel. Pemerintah dan mitra berjanji untuk

menerapkan delapan prinsip kemitraan yang efektif di Laos untuk mendukung realisasi Agenda 2030 dan TPBs.

Komite Nasional implementasi dan lokalisasi TPB saat ini dipimpin oleh Perdana Menteri Laos dan mencakup semua menteri di pemerintahan, untuk memastikan bahwa kepemimpinan yang efektif dilaksanakan atas kebijakan dan strategi pembangunan negara, sejalan dengan Agenda 2030 dan TPB, dan untuk mengoordinasikan upaya nasional untuk membangun kemitraan yang lebih kuat dengan berbagai pelaku pembangunan yang bekerja di negara ini. Untuk membantu mewujudkan kemajuan TPBs, Laos telah mengintegrasikan Agenda 2030 tentang Pembangunan Berkelanjutan ke dalam visi jangka panjangnya sendiri untuk tahun 2030, seperti yang diungkapkan dalam Rencana Pembangunan Sosial Ekonomi Nasional (NSEDPs), yang diterbitkan setiap lima tahun. Periode 2015 hingga 2030 dicakup oleh tiga NSEDP: NSEDP ke-8 (2016–2020), NSEDP ke-9 (2021–2025), dan NSEDP ke-10 (2026–2030).

Presiden Korea Selatan Park Geun-hye meminta balas budi dari Laos Bounnhang Vorachith untuk "secara aktif" mendukung langkah-langkah internasional untuk merespon dengan keras uji coba nuklir terbaru Korea Utara. Dalam KTT mereka pada 9 September 2016, di ibukota Laos, Vientiane,

Park menekankan bahwa provokasi nuklir dan rudal Pyongyang secara serius mengancam perdamaian dan stabilitas Asia Timur Laut dan seluruh dunia. Selama KTT, kedua pemimpin juga sepakat untuk memperkuat komunikasi strategis melalui pertukaran personel tingkat tinggi dan memperdalam kerja sama bilateral di sektor politik dan pertahanan, menurut Cheong Wa Dae, istilah untuk kantor kepresidenan Republik Korea Selatan. Di bidang pembangunan, Presiden Park menyatakan keinginan Seoul untuk mendukung proyek pembangunan sosial ekonomi Laos yang sedang berlangsung. Selain itu, dia berjanji untuk melaksanakan serangkaian proyek pembangunan untuk Laos, termasuk program "Lebih Baik untuk Anak Perempuan", yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan perawatan kesehatan bagi perempuan muda di negara bagian Asia Tenggara itu. Seoul yakin Vientiane, yang saat ini menjabat sebagai ketua bergilir dari 10 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dapat memainkan peran dalam memastikan bahwa masyarakat internasional akan mengambil tindakan tegas dalam menanggapi uji coba nuklir kelima Pyongyang. KTT itu diadakan beberapa jam setelah gempa berkekuatan 5 terdeteksi di dekat situs nuklir Korea Utara di wilayah timur lautnya, dengan kuat menunjukkan bahwa negara tertutup itu melakukan uji coba nuklir lagi. Kedua belah pihak kemudian bertukar pandangan tentang upaya bersama untuk mendukung tujuan pembangunan pedesaan Laos. Dia

secara khusus mengeksplorasi cara-cara untuk menerapkan manfaat dari apa yang disebut Gerakan Saemaul Korea Selatan yang dilakukan pada tahun 1970-an. Hubungan diplomatik Korea Selatan terputus pada tahun 1975 karena terjadinya perang Indo-China, tetapi kedua negara memulihkan hubungan formal pada tahun 1995.

Korea Utara telah memelihara hubungan diplomatik dengan Laos sejak tahun 1974. Korea Selatan adalah mitra dagang terbesar keempat Laos setelah Thailand, Cina dan Jepang. Perdagangan dua arah, yang mencapai US\$41 juta pada 2006, mencapai \$198 juta tahun lalu sebagian besar karena kesepakatan perdagangan bebas antara Korea Selatan dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yang mulai berlaku pada 2007. Menurut berita Yonhap, Korea Selatan dan **Universitas Nasional Seoul** telah sepakat untuk memberikan dukungan untuk memodernisasi layanan medis dan pendidikan yang diberikan oleh rekan-rekan mereka di Laos. Sebuah nota kesepahaman (MOU) untuk kerja sama ditandatangani oleh Universitas Nasional Seoul dan perguruan tinggi kedokteran negara bagian Laos, di mana perguruan tinggi kedokteran dan rumah sakit sekolah Korea Selatan akan memberikan berbagai dukungan kepada rekan-rekan mereka di Laos, termasuk program pelatihan gratis (*Ministry of Health*, 2016). Park yang sedang dalam kunjungannya pada KTT G20 di Laos, mencapai kesepakatan dengan mitra nya dari Laos yang di

tandatangani di sela-sela pertemuan dari kedua presiden dalam peringatan KTT G20. Berdasarkan perjanjian baru, fakultas kedokteran dan rumah sakit universitas Universitas Nasional Seoul akan mengundang fakultas sekolah dan staf rumah sakit dari rekan-rekan mereka di Laos untuk program pelatihan gratis, sementara mereka juga akan mengirimkan tenaga medis mereka untuk bekerja sebagai penasihat medis khusus di Laos. Menurut Yonhap News dari Vientiane, Korea Selatan dan Laos menandatangani 18 nota kesepahaman (MOU) pada 9 September 2016 untuk memperdalam kerja sama bilateral dalam perdagangan, investasi, perawatan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan pertukaran budaya.

MOU, sebagian besar tentang kerja sama ekonomi, ditandatangani setelah pertemuan puncak antara Presiden Korea Selatan Park Geun-hye dan mitranya dari Laos Bounnhang Vorachith di Vientiane. Laos adalah perjalanan ketiga dan terakhir dari delapan hari perjalanan Park yang juga membawanya ke Rusia dan Cina. Diantaranya adalah serangkaian MoU untuk meningkatkan kerja sama dalam memelihara profesional medis Laos, mencegah penyakit menular dan memperkenalkan layanan *telemedicine*, yang akan meningkatkan sistem kesejahteraan Laos dan membuka jalan bagi industri medis Korea Selatan untuk membuat terobosan ke kawasan Asia Tenggara. Pengaturan ini melibatkan Rumah Sakit Mahosot dan Rumah Sakit Anak terkemuka Laos di

Vientiane. Nota Kesepahaman akan meningkatkan "Proyek Seoul Korea Selatan-Laos" di mana Seoul telah melakukan penelitian medis bersama, melatih profesor medis Laos dan memberikan bantuan terkait *telemedicine*. Sejak 2011, proyek ini telah melatih 72 profesor Laos. MoU juga mencakup serangkaian pengaturan untuk meningkatkan kerja sama pertanian dengan berbagi informasi kebijakan dan memperluas pertukaran teknologi, dan untuk membangun kota energi ramah lingkungan di Laos. Proyek kota ramah lingkungan adalah inisiatif utama Seoul untuk memerangi perubahan iklim dan mendukung industri energi baru. Kota ini memiliki seperangkat tanaman untuk menghasilkan energi bersih melalui pengolahan sumber daya alam dan terbarukan, seperti biomassa dan energi matahari. Bank Ekspor-Import Korea Selatan menandatangani perjanjian pinjaman - senilai US\$53 juta - dengan kementerian keuangan Laos untuk mendukung sebuah proyek untuk mengelola daerah di sepanjang Sungai Mekong di Provinsi Champasak, Laos selatan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 9 (Tujuan 9 atau TPB 9) adalah tentang "industri, inovasi dan infrastruktur" dan merupakan salah satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2015. TPB 9 bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi yang berkelanjutan dan mendorong inovasi.

PBB menjelaskan bahwa Investasi dalam infrastruktur, transportasi, irigasi, energi dan teknologi informasi dan komunikasi – sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat di banyak negara. Telah lama diketahui bahwa pertumbuhan produktivitas dan pendapatan, serta peningkatan hasil kesehatan dan pendidikan memerlukan investasi di bidang infrastruktur. PBB telah menetapkan 8 Target dan 12 Indikator untuk TPB 9. Target menentukan tujuan dan Indikator mewakili metrik yang digunakan dunia untuk melacak apakah Target ini tercapai

TPB 9 mempunyai delapan target, dengan dua belas indikator yang digunakan untuk melacak kemajuan. Lima tujuan pertama adalah "tujuan hasil": Mengembangkan infrastruktur yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif; mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan; memperluas akses ke layanan dan pasar keuangan; meningkatkan semua industri dan infrastruktur untuk kelangsungan jangka panjang; dan meningkatkan penelitian dan teknologi industri. Tiga tujuan lainnya adalah "sarana untuk mencapai" tujuan: Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di negara-negara berkembang; mendorong pengembangan teknologi dalam negeri dan diversifikasi industri; dan memastikan akses universal terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya saling berhubungan dengan TPBs lainnya. Sementara industrialisasi terkait dengan

TPB 8 (pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi) dan TPB 11 (kota dan masyarakat yang berkelanjutan), inovasi dan pengembangan keterampilan baru akan membantu pencapaian TPBs 2 (nol kelaparan) dan 6 (kota dan komunitas yang berkelanjutan) (air bersih dan sanitasi), TPB 7 (energi yang terjangkau dan bersih) dan TPB 11 (kota dan masyarakat yang berkelanjutan).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di latar belakang, pertanyaan yang ingin diangkat dalam penelitian adalah: Bagaimana kerja sama Laos – Korea Selatan melalui *Republic Of Korea New Southern Policy* dan *New Southern Policy+* berkontribusi dalam pencapaian TPB Laos 2030 khususnya dalam Tujuan ke 9?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang disusun oleh peneliti, tujuan penelitian ini ialah:

Dikarenakan salah satu tujuan dari NSP+ milik Korea Selatan ialah untuk membangun landasan untuk kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan dan berorientasi masa depan, maka tujuan dari penelitian adalah untuk melihat

bagaimana kerja sama Laos dan Korea Selatan melalui NSP+ dapat berkontribusi dalam pencapaian TPB 9 Laos.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi untuk kemajuan dalam bidang studi Hubungan Internasional, khususnya kerja sama/*partnership* dalam mencapai TPB.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam memperkaya literasi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam literasi Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi bahan bacaan dan rujukan para masyarakat, dunia akademi dan pengambil kebijakan bagi negara Laos terkait hasil pengaruh NSP+ Korea Selatan terhadap Negara Laos.
- b. Penelitian ini bermanfaat untuk Laos agar mampu mengevaluasi kebijakan negara Korea Selatan (NSP+) terhadap pengaruh peningkatan kualitas pembangunan di negara Laos.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian kualitatif bisa dilakukan oleh peneliti di bidang ilmu sosial. Menurut Kriyantono “Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.” Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini. Penelitian dalam metode ini menyoroti kebijakan suatu negara yang memiliki dampak terhadap suatu negara. Maka pada penelitian ini akan menyoroti terkait peranan kebijakan suatu negara terhadap negara lain. Merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variabel yang tersedia, maka peneliti melakukan analisa data berdasarkan data-data serta informasi yang dikeluarkan oleh situs-situs resmi NSP+, SDGS, pemerintahan negara Laos, lalu kemudian diimplementasikan dengan teori-teori dalam kajian Hubungan Internasional.

1.5.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Studi kasus adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan pengetahuan yang mendalam dan beragam dari subjek yang

sulit dalam contoh kehidupan nyata. Ini adalah desain penelitian mapan yang digunakan secara luas di berbagai bidang, terutama dalam ilmu sosial. Studi kasus adalah pemeriksaan mendalam terhadap suatu peristiwa atau kejadian tertentu dalam masyarakat yang dilakukan untuk menganalisis konteks, kondisi, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus merupakan jenis penelitian yang memiliki unit analisis yang lebih mengacu pada tindakan individu atau lembaga dibandingkan dengan diri individu maupun lembaga itu sendiri. (Tellis, 1997) Dapat dikatakan studi kasus lebih berfokus pada tindakan atau perilaku yang dihasilkan. Sehingga menghindari bias atas penilaian diri pada individu atau lembaga tertentu yang menjadi subjek penelitian. Selain itu, unit analisis dapat berbeda dan bervariasi pada setiap individu dan lembaga.

1.5.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder adalah data penelitian yang telah dikumpulkan dan tersedia untuk peneliti. Data primer, di sisi lain, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data sekunder digunakan untuk meningkatkan ukuran sampel proyek penelitian, serta untuk efisiensi dan kecepatan yang datang dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada. Data sekunder membantu upaya penelitian utama di mana beberapa kelompok penelitian berkolaborasi untuk memperoleh data sekunder. Peneliti utama kemudian

bebas untuk berkonsentrasi pada penelitian utama atau bidang minat tertentu. Para peneliti mendapat manfaat dari pembagian kerja ini karena memungkinkan mereka untuk belajar lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Keuntungan menggunakan data sekunder adalah sebagian besar pekerjaan dasar sudah selesai. Data mungkin telah disortir dalam format elektronik, diterbitkan, dan diperiksa dengan studi kasus. Melalui penggunaan media, fakta-fakta sekunder dapat dengan cepat menjadi pengetahuan publik. Data sekunder memiliki validitas yang lebih besar daripada data penelitian asli karena eksposur dan pengawasan publik, dan sering digunakan untuk memverifikasi data primer.

Dokumentasi menurut Sugiyono (2018:476), adalah sarana untuk memperoleh data dan informasi berupa buku, arsip, makalah, angka tertulis, dan foto berupa laporan dan informasi yang dapat membantu pembelajaran.

Tabel 1.1 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data		Kelompok data
Sekunder	Dokumentasi	<p>a. Penelahaan dan pencatatan isi buku dan jurnal tentang kebijakan <i>New Southern Policy</i> Korea Selatan</p> <p>b. Penelahaan dan pencatatan isi <i>website</i> resmi di internet tentang <i>New Southern Policy+</i> dan Pembangunan Laos.</p>	<p>1. Data terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Laos</p> <p>2. Data terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tujuan 9</p> <p>3. Data terkait <i>New Southern Policy+</i></p> <p>4. Data terkait kerja sama dan kontribusi NSP+ dalam mencapai TPB 9</p>

1.5.3 Teknik Validasi Data

Uji kredibilitas merupakan ukuran kepercayaan terhadap temuan penelitian kualitatif (Prastowo, 2012: 266). Menurut Moleong (2016:324), uji kredibilitas ini memiliki dua tujuan: pertama adalah untuk melakukan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan atas temuan peneliti dapat dicapai, dan yang kedua adalah untuk menunjukkan tingkat kepercayaan peneliti terhadap penulis dengan membuktikan beberapa fakta yang sedang diteliti.

Triangulasi teknis, triangulasi temporal, dan triangulasi sumber adalah tiga jenis triangulasi. Triangulasi teknis mengacu pada penggunaan beberapa prosedur pengumpulan data oleh peneliti untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi waktu mengacu pada penggunaan wawancara, observasi, atau pendekatan lain oleh peneliti pada beberapa waktu atau dalam konteks yang berbeda. Jika hasil pengujian menghasilkan data yang berbeda, maka proses diulangi sampai kepastian data ditentukan. Istilah "triangulasi sumber" mengacu pada perolehan data dari beberapa sumber dengan menggunakan pendekatan yang sama. Penulis menggunakan triangulasi sumber dalam penelitian ini, yang berarti peneliti membandingkan informasi yang dikumpulkan dari satu sumber ke sumber lainnya. Menggunakan

beberapa metodologi untuk menyelidiki sumber yang sama dan menentukan waktu yang berbeda (Sugiyono 2008).

1.5.4 Teknik Analisis Data

Menurut Max Weber (dalam Eriyanto, 2013:15), analisis isi adalah pendekatan penelitian yang menggunakan serangkaian proses untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat dari teks. Menurut Eriyanto (2010:47), analisis deskriptif adalah jenis analisis isi yang digunakan untuk mencirikan suatu pesan atau teks tertentu secara mendalam. Tujuan dari desain analitik ini bukan untuk menguji hipotesis tertentu atau hubungan antar variabel.

1.6 Sistematika Penulisan

Proposal skripsi ini terbagi menjadi empat bab dalam setiap Bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan tentang *New Southern Policy* milik Korea Selatan, mengenai bantuan

pembangunan negara Korea Selatan dan Laos serta tentang pemenuhan *SDG's* oleh negara Laos.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran dan argumen utama yang menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan antara karya ilmiah peneliti lain dengan penelitian penulis, serta penggunaan teori dan pemikiran untuk menjadi landasan dalam penelitian sehingga menghasilkan argumen utama dalam penelitian skripsi.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini peneliti mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai Pembangunan Nasional di Laos, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Laos, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tujuan 9 di Laos, Kerja sama Laos dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tujuan 9, Kerja sama Korea Selatan dengan Laos dalam mencapai TPB 9, Pencapaian Indikator SDGs Pembangunan atau TPB 9 di Laos.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi sub-bab mengenai kesimpulan dan rekomendasi terkait isu yang diangkat.

